

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis tuangkan mengenai penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN (Bendahara Umum Negara) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. Dalam penerapan sistem pengendalian intern, KPPN Solok sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu dengan adanya penyusunan kontrak kinerja, memiliki sasaran strategis untuk mencapai target kinerjanya, komitmen dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa, dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara.
2. Prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta adanya perancangan sistem akuntansi yang baik untuk membantu dalam mengendalikan kas negara.

3. Dokumen yang digunakan dalam proses pengeluaran kas sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Dokumen tersebut akan menjadi bukti yang sah dan sebagai arsip dalam transaksi pengeluaran kas.
4. Struktur pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok dapat dikatakan efektif, karena sistem pengendalian yang dilakukan sudah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan sehingga dapat meminimalisir risiko dan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi serta terciptanya pelayanan yang baik demi tercapainya tujuan dari instansi ini.
5. Efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada KPPN Solok didukung beberapa hal, seperti adanya pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antar pegawai, sistem otorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta terciptanya pegawai yang bermutu.

5.2. Saran

Dari kegiatan Magang yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok, untuk menambah manfaat penulisan tugas akhir ini maka dapat diberikan beberapa saran, yakni :

1. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok sebaiknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi seiring dengan kemajuan

teknologi demi terwujudnya pengendalian internal yang baik dan memadai.

2. Pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi karena perlunya penyesuaian baik untuk satker ataupun untuk KPPN Solok agar dapat tercapainya keberhasilan transaksi sehingga satker tidak perlu melakukan perbaikan. Dengan begitu, diharapkan dapat tercapainya proses transaksi yang efektif dan efisien.

